



Menciptakan Keunggulan Kompetitif Produk dalam Negeri



Massive Open Online Course (MOOC)
Universitas Airlangga
2021

DAFTAR ISI

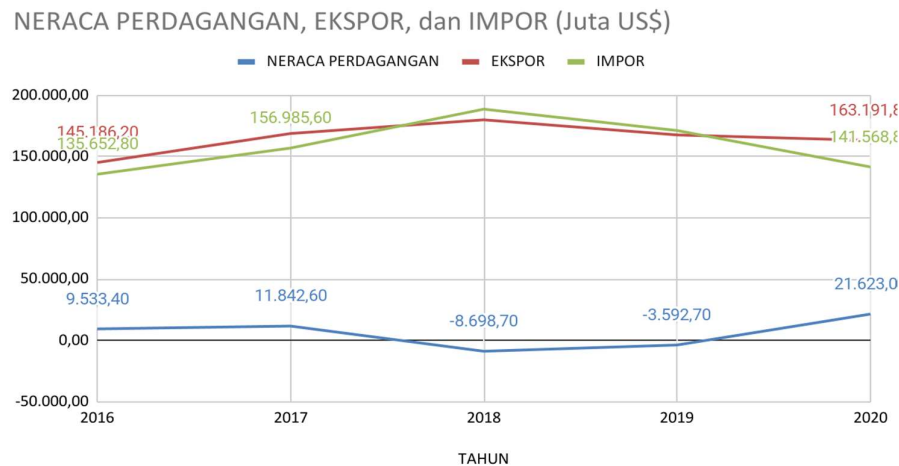
HALAMAN SAMPUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I KONDISI PRODUKSI DALAM NEGERI	3
1.1 Pendahuluan	4
BAB II PENGERTIAN DAN KONSEP GNP	9
2.1 Pengertian GNP.....	10
2.2 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Produksi Dalam Negeri.....	11
2.3 Pengaruh Ekspor Impor Terhadap GNP.....	13
2.4 Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Produksi Dalam Negeri	14
BAB III KONSEP PENGEMBANGAN PRODUKSI DALAM NEGERI.....	16
BAB IV MENGHADAPI TANTANGAN DALAM MEMPRODUKSI PRODUK DALAM NEGERI	24
4.1 Menentukan Produk Unggulan Dengan <i>Location Quotient</i> (LQ).....	25
4.2 Cara Menghitung Daya Saing Produk dengan Daya Saing Komparatif dan Daya Saing Kompetitif.....	27
4.3 Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia	30
DAFTAR PUSTAKA	32

BAB I

KONDISI PRODUKSI DALAM NEGERI

1.1 Pendahuluan

Grafik di bawah ini menunjukkan tren nilai neraca perdagangan, ekspor, dan impor yang sedikit meningkat. Kenaikan tajam nilai neraca perdagangan pada tahun 2020 dari tahun 2019 dipicu oleh penurunan yang lebih besar dari tahun 2019 pada nilai impor (\$29.706,90 juta) dibandingkan pada nilai ekspor (\$4.491,20 juta).



Sumber: Badan Pusat Statistik (2021).

Gambar 1.1

Neraca Perdagangan, Ekspor, dan Impor Indonesia Tahun 2016-2020 (Juta US\$)

Menuru Suhardi dan Afrizal (2021), dalam mengukur posisi perdagangan internasional suatu negara untuk berhasil, negara tersebut harus mengembangkan dan mempromosikan keunggulan kompetitif. Lima sektor dengan kontribusi tertinggi terhadap PDB pada tahun 2020 berdasarkan harga konstan 2010 adalah; (i) Industri Pengolahan sebesar 20,61%, (ii) Perdagangan Besar Dan Eceran sebesar 12,93%; (iii) Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor, Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan sebesar 12,85%, (iv) Konstruksi sebesar 10,00%, dan (v) Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,37%. Dari kelima sektor tersebut, menurut Portal Statistik Perdagangan (n.d.), **Tabel**

1.1 adalah produk-produk dengan perkembangan ekspor tertinggi menurut HS enam digit yang berpotensi meningkatkan iklim perekonomian Indonesia.

Harmonized System atau biasa disebut HS adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya. Saat ini pengklasifikasian barang di Indonesia didasarkan kepada Harmonized System dan dituangkan ke dalam suatu daftar tarif yang disebut Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).

HS Code adalah yang paling menentukan regulasi tiap barang impor maupun ekspor, mencakup dokumen apa saja yang harus dipenuhi oleh importir/eksportir dan menentukan besarnya *duty and tax* yang harus dibayarkan kepada negara. Pengklasifikasian produk secara internasional ini bertujuan agar semua negara memiliki persepsi yang sama mengenai jenis barang yang diimpor/ekspor. Sekaligus, untuk memudahkan Bea Cukai yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk mengawasi pergerakan barang yang masuk ataupun keluar Indonesia.

Untuk di Indonesia, awalnya pengklasifikasian barang dituangkan dalam daftar tarif yaitu Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) terdiri dari sepuluh digit nomor. Enam digit nomor yang berada di depan dibuat oleh *World Customs Organization* (WCO) berisi 97 bab yang berlaku secara *international*. Sistem klasifikasi HS enam digit tersebut dapat diperluas menjadi subkategori tambahan oleh masing-masing negara penggunanya. Di ASEAN sendiri sepakat membuat ASEAN *Harmonized Tarif Nomenclature* (AHTN) terdiri dari delapan digit yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari enam digit HS. Per 1 Maret 2017 HS Code di Indonesia mengikuti AHTN dan menggunakan sistem delapan digit.

Tabel 1.1**Komoditas Ekspor Tertinggi Menurut HS Enam Digit**

HS	Uraian	Perkembangan Ekspor Menurut HS Enam Digit Periode 2020
151190	Minyak sayur; Minyak Sawit Dan Fraksinya, Selain Mentah, Dimurnikan Maupun Tidak, Tetapi Tidak Dimodifikasi Secara Kimia	12.620,4
270119	Batu bara; (Selain Antrasit Dan Bituminous), Dihaluskan Maupun Tidak Tetapi Tidak Diaglomerasi	10.616,7
710812	logam; Emas, Non-moneter, Tidak Ditempa (tetapi Bukan Bubuk)	5.541,9
151110	Minyak sayur; Minyak Sawit Dan Fraksinya, Mentah, Tidak Dimodifikasi Secara Kimia	4.743,6
720260	Ferro-alloys; Ferro-nickel	4.738,9
270112	Batu bara; Bituminous, Dihaluskan Atau Tidak, Tapi Tidak Diaglomerasi	3.774,8
271111	Gas Minyak Bumi Dan	3.609,5

	Hidrokarbon Gas Lainnya; Cair, Gas Alam	
400122	Karet; Karet Alam Yang Ditentukan Secara Teknis (tsnr), Dalam Bentuk Primer Atau Dalam Pelat, Lembaran Atau Strip (tidak termasuk Lateks Dan Lembaran Asap)	2.900,9
260300	Bijih Tembaga Dan Konsentrat	2.412,2
470329	bubur kayu; Pulp Kayu Kimia, Soda Atau Sulfat, (Selain Tingkat Pelarutan), Semi-Bleached Atau Bleached, Dari Kayu Non-konifer	2.108,4

Sumber: Portal Statistik Perdagangan, SatuData Kemendag.

Untuk mengukur produktivitas perusahaan sektor swasta bisa menggunakan Purchasing Manager Index (PMI). Menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (2020), dampak dari adanya pandemi COVID-19 menekan angka PMI dari 50,8 pada bulan agustus, menjadi 47,2 pada bulan September. Masyarakat yang terhalangi mobilitasnya tidak dapat bekerja, berbelanja ke mal atau pasar, dan berkegiatan lain. Survei yang dilaksanakan IHS Markit mengatakan bahwa pelaksanaan pembatasan kegiatan mendisrupsi kegiatan pabrik.

Sementara untuk pelaku UMKM, aktivitas bisnisnya dapat dilihat melalui BRI Micro & SME Index atau BMSI (CNBC Indonesia, 2021). Pada kuartal keempat tahun 2020, BMSI tercatat sebesar 81,5, yaitu turun sebanyak 2,7 dari kuartal ketiga. Angka ini menurun beriringan dengan penurunan PDB sebesar 0,42% dari kuartal ketiga ke kuartal

keempat tahun 2020. Penyebab utama penurunan tersebut adalah dampak dari pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat.

Menurut Fadhlidkk. (2021), pembatasan yang disebabkan oleh pandemi COVID 19 mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi menurun. Hal ini dikarenakan ketidakseimbangan yang dirasakan selama harus berada di rumah saja, pendapatan yang semakin menurun dan kebutuhan untuk hidup yang meningkat, seperti untuk pembelian masker, kuota internet, dan lain-lain. Diketahui bahwa pada pandemi ini, angka konsumsi rumah tangga mengalami penurunan sebesar 5,51%. Penurunan ini dipicu dari kebiasaan atau pola hidup baru yang terbentuk semenjak krisis ini melanda, yaitu bahwa masyarakat semakin hemat dan belajar untuk memiliki dana darurat.

Menurut survei Katadata (2020), Katadata *Insight Center* mengenai perilaku belanja konsumen Indonesia pada saat pandemi adalah bahwa sebanyak 35,3% responden memperhatikan asal negara produk yang akan dibeli, 41,3% terkadang memperhatikan, dan 23,5% tidak mempermasalahkan asal negara produk.

Namun, hasil survei juga menyajikan fakta bahwa sebanyak 87,2% responden lebih memilih produk dalam negeri dan 12,8% lebih memilih produk luar negeri. Konsumen cenderung memilih produk seperti obat-obatan, sepatu, baju, *skin care*, dan furniture dari dalam negeri. Sementara produk luar negeri untuk barang lain seperti alat elektronik dan sebagainya.

Terkait data belanja masyarakat melalui *e-commerce* dan preferensinya terhadap produk dalam negeri dan impor belum ada. Namun, menurut Rakhmawati (2021), pandemi memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap penggunaan *e-commerce*. Pada masa ini, 48% masyarakat cenderung membeli produk dari kategori hobi, 48% cenderung membeli produk kategori fashion, 30% cenderung membeli elektronik, 28% cenderung membeli kategori lainnya, 28% masyarakat cenderung membeli produk dari kategori kesehatan, serta 13% dari kategori kecantikan.

BAB II

PENGERTIAN DAN KONSEP GNP

2.1 Pengertian GNP

Dapat dilihat langsung pengertian GNP dengan melihat perbedaan antara GNP dan GDP. Perbedaan utamanya antara GDP dan GNP adalah bahwa GNP mempertimbangkan output warga suatu negara terlepas dari di mana aktivitas ekonomi itu terjadi. Sebaliknya, GDP mempertimbangkan aktivitas dalam ekonomi nasional terlepas dari tempat tinggal produsen. Contohnya adalah pada penerimaan pendapatan bersih perusahaan asing milik warga negara asing yang memproduksi barang di negara yang diteliti. Karena GNP hanya mempertimbangkan warga suatu negara dan output ekonomi mereka, GNP tidak memasukkan perusahaan semacam itu dalam pengukurannya. Namun, GDP mengukur output ekonomi terlepas dari negara tempat tinggal—jadi GDP memasukkan perusahaan semacam itu dalam pengukurannya.

Demikian pula, GNP akan selalu memasukkan penerimaan pendapatan bersih dari investasi internasional yang dilakukan oleh penduduknya sedangkan GDP tidak. Sebaliknya, GDP akan selalu memasukkan investasi asing di dalam batas suatu negara, sedangkan GNP tidak. Ekonom dan investor lebih memperhatikan GDP daripada GNP karena memberikan gambaran yang lebih akurat tentang aktivitas ekonomi total suatu negara terlepas dari negara asalnya, dan dengan demikian menawarkan indikator kesehatan ekonomi secara keseluruhan yang lebih baik. Meskipun demikian, GNP tetap penting, terutama jika dibandingkan dengan GDP dari tahun yang sama. Rumus untuk menghitung komponen GNP adalah sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + X + Z \quad (1)$$

Bermakna demikian, GNP = Konsumsi + Investasi + Pemerintah + X (ekspor bersih) + Z (pendapatan bersih yang diperoleh penduduk domestik dari investasi luar negeri dikurangi pendapatan bersih yang diperoleh penduduk asing dari penanaman modal dalam negeri).

GNP per kapita adalah ukuran GNP dibagi dengan jumlah orang di negara tersebut. Itu memungkinkan untuk membandingkan GNP negara-negara dengan ukuran populasi yang berbeda. Bank Dunia telah menggantikan GNP dengan pendapatan

nasional bruto (GNI). Agar GNI dapat dibandingkan secara lebih adil di antara negara-negara dengan populasi dan standar hidup yang sangat berbeda, Bank Dunia menggunakan GNI per kapita. Meskipun GNP mencerminkan posisi keuangan suatu negara, GNP bukanlah ukuran kesehatan ekonomi yang akurat dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

- Nilai tukar mata uang asing mempengaruhinya.
- Tidak memberikan gambaran yang akurat tentang penggunaan sumber daya domestik.
- Bukan ukuran yang baik apakah ekonomi tumbuh atau menyusut.

2.2 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Produksi Dalam Negeri

Faktor yang mempengaruhi produksi secara umum adalah sebagai berikut:

a. Faktor Sumber Daya Alam

Faktor sumber daya alam adalah jenis faktor produksi yang termasuk di dalam bahan-bahan mentah untuk dijadikan produk. Bahan mentah inilah yang nantinya akan diolah menjadi barang/ jasa yang akan dipasarkan ke konsumen.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia juga jenis faktor yang sangat penting. Karena tidak mungkin bahan mentah bisa menjadi bahan setengah jadi lalu produk/barang jadi jika tidak ada manusia yang mengolahnya. Maka dari itu sumber daya manusia juga harus ada di dalam perusahaan. Terutama yang memang memiliki kompetensi bagus dalam bidang pengolahan produk. Termasuk bisa mengoperasikan alat-alat produksi.

c. Faktor Modal

Sumber daya manusia dan juga sumber daya alam sudah tersedia, tetapi masih belum cukup untuk melahirkan produk yang bagus. Bisa dibayangkan ini faktor produksi yang tidak lengkap yang hasilnya juga tidak akan memuaskan. Dalam pembuatan produk tentu membutuhkan modal produksi. Ini untuk membeli bahan

mentah, alat produksi serta untuk membayar tenaga kerja. Maka dari itu, modal juga perlu dimasukkan ke dalam faktor produksi.

d. Faktor Kewirausahaan

Faktor kewirausahaan atau faktor manajemen juga perlu dimasukkan ke dalam faktor produksi. Karena yang menentukan keberhasilan produksi bukan hanya produk melainkan teknik, strategi, perencanaan, kontrol dan selainnya. Bahan mentah, SDM, SDA dan modal sudah tersedia. Tetapi tidak ada strategi, rencana, kontrol dan pengawasan saat produk dibuat, tentu hasilnya juga tidak akan memuaskan. Tentunya ini hanya akan menghasilkan produk yang tidak memiliki keunggulan dan tidak laris di pasaran.

e. Faktor Sumber Daya Informasi

Sumber daya informasi menjadi salah satu faktor yang juga penting terutama di jaman global semacam ini. Yang mana alur lalu lintas informasi semakin cepat dengan adanya internet. Nah, pihak perusahaan harus mengelola faktor ini dengan baik. Minimal tidak ketinggalan informasi tentang produk apa yang dibutuhkan masyarakat di saat ini.

MintoPurwo (2000) menyebutkan bahwa faktor-faktor produksi disebut juga sumber daya ekonomi atau alat produksi yang meliputi faktor produksi alam, faktor faktor tenaga kerja, produksi modal dan faktor produksi keterampilan. Selain itu dari penelitian Godam (2006), faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya suatu industri meliputi modal, tenaga kerja, bahan mentah/bahan baku, transportasi, sumber energi atau bahan bakar, tenaga kerja dan pemasaran. Salah satu contoh nyata pada penelitian yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi industri furnitur kaca dan alumunium di Pekanbaru oleh Akbar (2017) adalah modal, tenaga kerja, dan bahan baku. Pengaruh modal, tenaga kerja, dan bahan baku terhadap produksi furniture kaca dan alumunium yang ada di Kota Pekanbaru adalah sebesar 93,9% dari seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi produksi lemari piring yang ada di Kota Pekanbaru, sedangkan sisanya

sebesar 6,1% merupakan faktor- faktor yang dapat dijelaskan oleh variabel lain yang berpengaruh terhadap tingkat produksi.

2.3 Pengaruh Ekspor Impor Terhadap GNP

Melalui ringkasan dari beberapa ekonom seperti Jhingan (2000), Sukirno (2011), Todaro dan Smith (2000), Mill (1967) dan Hiks (1930) bahwa ekspor mencerminkan aktivitas perdagangan antar bangsa yang dapat memberikan dorongan dalam dinamika pertumbuhan perdagangan internasional, sehingga suatu negara yang sedang berkembang untuk dapat mencapai kemajuan perekonomian yang setaraf dengan negara-negara maju.

Menurut Soediyono (1990), keadaan dan kejadian yang pada umumnya dapat mengakibatkan bertambahnya ekspor antara lain:

1. Meningkatnya nilai kemakmuran masyarakat dunia;
2. Tingkat inflasi didalam negeri lebih rendah dibandingkan dengan tingkat-tingkat inflasi yang terjadi dinegara-negara banyak pengimpor barang-barang ekspor.
3. Kurs devisa efektif yang berlaku bagi barang-barang ekspor menguntungkan;
4. Peningkatan efisiensi produksi didalam negeri dalam artian luas, yang dapat mengakibatkan produsen-produsen barang ekspor dengan harga "*free on board (f.o.b)*" yang sama dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi;
5. Kegagalan produksi dinegara-negara penghasil produk yang bersaing dengan produk ekspor kita dipasar dunia;
6. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang serasi disertai dengan kebijakan peningkatan ekspor yang tepat;
7. Adanya peningkatan efisiensi produksi secara menyeluruh dalam perekonomian negara pengekspor.

Impor adalah arus kebalikan dari ekspor yaitu barang dan jasa luar negeri yang masuk ke dalam suatu negara (Sukirno, 2011). Impor yang melebihi ekspor akan mendorong neraca pembayaran mengalami penurunan yang signifikan. Pembatasan jumlah diimpor dapat dilakukan untuk melindungi kemerosotan neraca pembayaran pemerintah terhadap

barang impor yang masuk. Pembatasan tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan pungutan pajak impor yang menjadikan harga produk luar di dalam negeri menjadi mahal dan mengurangi permintaan terhadap impor. Selain meningkatkan pungutan pajak impor, halangan perdagangan non tarif dan batasan penggunaan valuta asing dapat menjadi alat lain untuk pembatasan impor di Indonesia (Case & Fair, 2007).

2.4 Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Produksi Dalam Negeri

Secara umum, Peranan Pemerintah dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat dipilah menjadi empat macam yaitu (Ananda, 2002):

1. Peran Alokatif, yakni peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi
2. Peran distributif, yakni peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Redistribusi bisa dilakukan dengan cara (1) *transfer programs*, (2) *provision of goods and services* dan (3) *manipulation of market prices*.
3. Peran stabilitatif, yakni peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan dis-equilibrium.
4. Peran dinamisatif, yakni peran pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju equilibrium.

Peran pemerintah dalam produksi dalam negeri berbeda-beda tergantung jenis produksi yang dilakukannya kita ambil salah satu contoh terdapat tujuh program di sektor pertanian dan perikanan yang terus dijalankan pemerintah untuk penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani/nelayan.

1. Pembangunan *food estate* (baik di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara) berbasis korporasi dalam kerangka penguatan sistem pangan nasional.

2. Pengembangan klaster bisnis padi menggunakan pendekatan pengelolaan lahan yang awalnya tersegmentasi menjadi satu area.
3. Pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor dengan model kemitraan *Creating Shared Value* (CSV) antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, dan petani
4. Kemitraan inklusif *Closed Loop* pada komoditas hortikultura sebagai bentuk implementasi sinergi antara akademisi, bisnis, pemerintah dan komunitas (ABGC).
5. Pengembangan 1.000 desa sapi program untuk peningkatan populasi dan produktivitas sapi.
6. Pengembangan industri rumput laut nasional untuk mengoptimalkan produksi dalam negeri. Dan, ketujuh, pengembangan korporasi petani dan nelayan dengan arah menuju sistem agribisnis hulu-hilir yang mengedepankan pemberdayaan mereka.
7. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai terobosan kebijakan yang diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam mengatasi penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, serta reformasi regulasi untuk mendorong transformasi ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional.

BAB III

KONSEP PENGEMBANGAN PRODUKSI DALAM NEGERI

Bagi Indonesia, wacana pengurangan konsumsi produk impor memang bukan hal yang mudah. Tingkat ketergantungan Indonesia terhadap produk luar negeri yang masih cukup tinggi menyebabkan kenaikan nilai impor seringkali melambung tinggi melebihi nilai ekspor. Kekuatan ekspor Indonesia dapat lebih ditingkatkan dengan adanya industrialisasi dan hilirisasi. Ironisnya, masalah modal dan sumber daya manusia (SDM) seringkali menjadi kendala. Tanpa ada investasi yang cukup dan ditunjang dengan SDM yang melek teknologi, industrialisasi dan hilirisasi akan berjalan lambat. Selain permasalahan SDM, Indonesia juga masih terkendala dalam hal sertifikasi dan kemajuan teknologi. Faktor-faktor tersebut menjadikan akses pasar Indonesia masih tergolong rendah. Indonesia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk maju sebagai negara dengan nilai ekspor tinggi jika masih menerapkan pola bisnis industri tradisional.

Berdasarkan amanah UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam pasal Pasal 22 dan Pasal 73, Pemerintah harus berperan aktif dalam kegiatan pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan Produk Dalam Negeri melalui beberapa langkah strategis, misalnya:



Sumber: Ilustrasi Penulis (2021)

Gambar 3.1

Konsep Pengembangan Produksi Dalam Negeri

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan untuk pengembangan dan pendampingan terhadap UMKM, khususnya dari sisi manajemen SDM, sehingga dapat naik kelas. Langkah ini dilakukan untuk dapat meningkatkan kapasitas daya saing dalam menghadapi persaingan usaha di dalam maupun di luar negeri. Peningkatan kapasitas SDM dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan BIMTEK untuk meningkatkan pengetahuan kewirausahaan, memberikan pengetahuan tentang akses pembiayaan, memberikan pengetahuan tentang akses pemasaran, dan memberikan pengetahuan tentang akses teentang manajemen keuangan.

2. Sertifikasi

Dalam aktivitas ekspor yang mengandalkan komoditas unggulan Indonesia, sertifikasi berperan penting. Sertifikasi yang diberikan pada sebuah perusahaan, merupakan bukti dijalankannya suatu sistem, yang mendorong kepastian mutu, kepatuhan terhadap pelestarian lingkungan, kesinambungan sumberdaya alam hingga mencegah tindakan penyipuan, dari hulu hingga hilir proses produksi. Pada sertifikasi yang diberikan pada produk kehutanan misalnya, sertifikasi memastikan bahan baku sebuah produk berasal dari sumber yang legal, bermanfaat bagi masyarakat, serta memperhatikan kelestarian lingkungan. Selain itu, sertifikasi juga memastikan bahwa produk yang diekspor memiliki standar yang dipersyaratkan oleh negara tujuan.

- **Standar wajib**, atau bisa kita sebut standar primer, merupakan standar dan persyaratan yang diwajibkan oleh pemerintah melalui regulasi. Inilah standar utama yang harus dipersiapkan oleh pelaku UKM untuk melakukan ekspor. Biasanya, standar wajib ini berupa spesifikasi teknis yang dikenakan pada produk yang didistribusikan ke pasar. Contoh dari spesifikasi teknis ini adalah berbagai 18atasan yang boleh terkandung dalam produk. Seringkali, standar wajib ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan, mencegah penipuan, serta menghindari

ketidaksiuaian produk. Standar wajib ini harus dipatuhi oleh semua supplier atau eksportir, bagaimanapun situasinya untuk dapat masuk ke suatu pasar atau negara.

Edisi publikasi: 1 Juni 2020

STANDAR WAJIB UNTUK EKSPOR PRODUK MAKANAN

Produk makanan berkaitan erat dengan kesehatan penduduk yang mengkonsumsinya. Jadi, banyak negara tujuan meregulasikan standarnya secara ketat.

Berikut ini komponen-komponen standar yang umumnya diwajibkan oleh berbagai negara tujuan ekspor untuk produk makanan.

JENIS STANDAR WAJIB	DESKRIPSI SINGKAT
RESIDU PESTISIDA	<ul style="list-style-type: none"> Batas maksimal residu yang boleh ada pada produk makanan. Contoh: Aldicarb, Endosulfan, Imidacloprid
KONTAMINAN	<ul style="list-style-type: none"> Batas maksimal kontaminan tertentu (barang yang tidak dikehendaki yang dapat tercampur) yang diperbolehkan pada produk makanan. Contoh: Zinc, Copper, Mercury, Tin
KONTAMINASI MIKROBIOLOGI	<ul style="list-style-type: none"> Kriteria mikrobiologi tidak diperbolehkan pada produk makanan. Contoh: E-Coli, Salmonella, Yeast
ADITIF, ENZIM, DAN PERASA	<ul style="list-style-type: none"> Daftar aditif, enzim, dan perasa yang diizinkan penggunaannya dalam bahan makanan. Contoh: monosodium glutamate (MSG)
PENGEMASAN	<ul style="list-style-type: none"> Bahan baku yang diperbolehkan bersentuhan dengan makanan, khususnya pada kemasan makanan individu atau jumlah besar (bulk).
PELABELAN	<ul style="list-style-type: none"> Persyaratan informasi pelabelan pada produk makanan. Disini juga diuraikan tentang pelabelan detail gizi dan bahan baku yang dapat menyebabkan alergi bagi konsumen.

"Sahabat UKM Makanan mau tahu selengkapnya? Baca yuk artikelnya di bit.ly/ukmindonesia04

Sumber: UKM Indonesia (2021).

Gambar 3.2
Standar Wajib Untuk Ekspor Produk Makanan

- **Standar khusus**, tidak dibutuhkan oleh banyak pembeli/importir, sehingga ini bersifat lebih tidak wajib untuk dipersiapkan. Untuk ilustrasi

lebih jelasnya, mari kita lihat perbedaan tersebut pada kasus produk kopi. Standar umum yang dibutuhkan banyak pembeli/importir adalah adanya sertifikat GLOBAL G.A.P untuk kualitas proses pertanian kopi, serta sertifikat ISO 9001 atau ISO 22000 untuk kualitas proses pengolahan kopi. Di lain hal, terdapat sebagian pembeli/importir yang khusus mendistribusikan produk organik, juga membutuhkan sertifikasi organik untuk memastikan bahwa kopi diproduksi dengan metode organik. Kesimpulannya, standar khusus tidak berlaku untuk semua pembeli/importir. Sehingga, eksportir haruslah mengetahui siapa target pembeli/importir, sebelum menyiapkan standar khusus ini. Yang harus diutamakan dalam mempersiapkan ekspor adalah standar umum yang dibutuhkan oleh kebanyakan pembeli/importir. Akan tetapi, yang jelas standar khusus ini akan memberikan keunggulan bagi eksportir karena target pasarnya spesifik.



Sumber: Kementerian Perdagangan (2021)

Gambar 3.3
Standar Khusus Untuk UKM Makanan

3. *Global Value Chain (GVC)*

Saat ini Indonesia rasanya perlu lebih fokus dalam upaya peningkatan nilai ekspor. Bukan hanya ekspor barang mentah tentunya, tetapi ekspor barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai tambah. Selama ini sebagian besar ekspor yang dilakukan Indonesia masih berbasis komoditas mentah atau bahan baku. Imbasnya, pendapatan ekspor Indonesia sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas dunia. Saat perekonomian dunia melambat dan berdampak pada penurunan produksi serta harga komoditas dunia maka permintaan ekspor Indonesia pun ikut menurun.

Langkah yang bisa diambil pemerintah untuk menghadapi tantangan ini adalah meningkatkan partisipasi Indonesia dalam *Global Value Chain (GVC)*. Dalam dua dekade terakhir, konsep GVC menjadi sangat populer. Menurut World Bank, GVC adalah suatu proses untuk menghasilkan satu produk barang jadi yang melibatkan beberapa negara mulai dari proses produksi hingga proses pemasarannya. GVC dapat berperan dalam mendorong peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan standar hidup suatu negara. Proses produksi menghasilkan barang jadi dapat berjalan lebih cepat dan efisien karena melibatkan teknologi yang lebih canggih. Beberapa negara dengan keunggulan ekonomi masing-masing saling bertukar sumber daya untuk menghasilkan produk barang sehingga nilai tambah yang dihasilkan dapat menjadi pendapatan ekspor bagi tiap negara tersebut.

Keunggulan GVC dalam meningkatkan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi membuat GVC direkomendasikan oleh World Bank dan World Trade Organisation (WTO) kepada negara-negara berkembang. Beberapa negara di Asia juga ikut berpartisipasi dalam GVC, tidak terkecuali Indonesia. Sayangnya, jika dibandingkan Negara lain di Asia Tenggara, angka indeks partisipasi Indonesia masih terbilang rendah. WTO mencatat pada tahun 2017 Indeks Partisipasi Indonesia adalah 43,5, berada di bawah Malaysia (60,8) dan Thailand (54,3).

Bahkan dalam Laporan *Global Value Chain Development Report 2019* yang dirilis oleh WTO dikemukakan bahwa Indeks Partisipasi Indonesia baik *forward* maupun *backward* mengalami penurunan dibandingkan tahun 2007. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan tentu perlu membuat kebijakan untuk meningkatkan indeks partisipasi Indonesia jika ingin meningkatkan nilai ekspor melalui GVC.

Menurut rekomendasi World Bank untuk dapat mengoptimalkan partisipasi dalam GVC, negara berkembang haruslah memiliki strategi dan kebijakan yang jelas dengan didukung oleh koordinasi antar-elemen baik pemerintah maupun swasta. Hal ini berarti kebijakan terkait pembatasan ekspor-impor dan investasi harus diatur sedemikian rupa agar mendukung pelaksanaan GVC. Dimensi lain yang juga perlu diperhatikan adalah penyiapan sumber daya manusia (SDM), teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pembangunan infrastruktur serta mobilitas pasar tenaga kerja. meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam GVC. UMKM sebagai pelaku ekonomi di Indonesia dapat meningkatkan kualitas produk dan kapasitas usaha jika diikutsertakan dalam GVC. Saat bergabung dalam GVC, akses UMKM terhadap informasi dan teknologi akan lebih terbuka. UMKM dituntut untuk memiliki standar proses produksi dan *output* yang tinggi sehingga kualitas UMKM Indonesia akan semakin baik.

Keikutsertakan UMKM Indonesia dalam GVC juga membuka peluang untuk mendapatkan aliran dana investasi serta adopsi teknologi dari luar negeri. Pada akhirnya, daya saing UMKM Indonesia akan semakin meningkat dan mampu bersaing di pasar internasional sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Posisi Indonesia dalam *Global Value Chain*



Partisipasi Indonesia dalam GVC masih tergolong rendah dibandingkan ekonomi negara berkembang maupun yang sudah maju, yakni hanya sekitar 43.5%. Partisipasi Indonesia didominasi oleh *forward participation* sebesar 31.5% dan *Backward Participation* sebesar 12% (*Backward Participation* / nilai tambah ekspor Indonesia tersebut relatif kecil dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand)

Rendahnya tingkat partisipasi Indonesia dalam GVC disebabkan karena:

- Indonesia masih memproduksi pada intermediate goods yang nantinya akan kembali dibeli setelah menjadi barang jadi.
- Indonesia masih bergantung pada ekspor hasil agrikultur dan tambang yang mana tidak memberikan value added cukup besar bagi Indonesia.



Sumber: *Global Value Chain (2021)*

Gambar 3.4

Posisi Indonesia Dalam *Global Value Chain*

BAB IV

MENGHADAPI TANTANGAN DALAM MEMPRODUKSI PRODUK DALAM NEGERI

4.1 Menentukan Produk Unggulan Dengan *Location Quotient* (LQ)

LQ sendiri adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat spesialisasi sektor-sektor perekonomian di suatu daerah serta memanfaatkan sektor basis. Sektor basis atau unggulan adalah sektor di suatu wilayah yang dapat bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh daerah lain di pasar nasional atau domestik (Wijaya (1996) dalam F u a i d a h dan A b d u s s a m a d (2 0 0 5)). Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang paling umum digunakan dalam model basis ekonomi sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi penggerak pertumbuhan (Raqib dan Rofiuddin, 2018). Terdapat dua cara untuk mengukur LQ suatu sektor dalam suatu wilayah ekonomi (Daryanto dan Hafizrianda (2010) dalam R. Jumiyan (2018)), yaitu:

1. Pendekatan nilai tambah atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

$$LQ = \frac{V_i/V_t}{Y_i/Y_t} \quad (2)$$

Dimana:

V_i = Nilai PDRB sektor i pada tingkat daerah

V_t = Total PDRB pada tingkat daerah

Y_i = Nilai PDRB sektor i pada tingkat nasional

Y_t = Total PDRB pada tingkat nasional

2. Pendekatan Tenaga Kerja

$$LQ = \frac{L_i/L_t}{N_i/N_t} \quad (3)$$

Dimana:

L_i = Jumlah tenaga kerja sektor i pada tingkat daerah

L_t = Total tenaga kerja pada tingkat daerah

N_i = Jumlah tenaga kerja sektor i pada tingkat nasional

N_t = Total tenaga kerja pada tingkat nasional

Adapun interpretasi hasil analisis LQ tersebut menurut Maulana dkk. (2020) adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai LQ lebih dari ($>$) 1, menunjukkan terjadinya konsentrasi produk suatu

komoditas atau usaha di suatu daerah terhadap total wilayah yang lebih luas atau terdapat konsentrasi aktivitas di daerah bersangkutan, komoditas tersebut termasuk sektor basis. Hasilnya komoditas tersebut selain dapat memenuhi kebutuhan daerah bersangkutan tapi juga dapat melakukan ekspor.

- 2) Jika nilai LQ adalah sama dengan ($=$) 1, menunjukkan bahwa kegiatan produksi kedua wilayah yang dibandingkan sama atau bahwa komoditas tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif. Hasilnya komoditas tersebut tergolong sektor non basis dan hanya dapat memenuhi kebutuhan daerah bersangkutan.
- 3) jika nilai LQ adalah kurang dari ($<$) 1, menunjukkan bahwa pangsa pada tingkat daerah relatif lebih kecil dibandingkan tingkat nasional atau telah terjadi defisit produksi di tingkat nasional. Hasilnya komoditas tersebut termasuk sektor non basis dan tidak dapat memenuhi baik kebutuhan daerah maupun melakukan ekspor.

Mengenai penggunaan metodenya, kelebihan analisis LQ adalah sebagai berikut:

- LQ adalah alat analisis yang mudah untuk digunakan karena kesederhanaan perhitungannya. Penyelesaian dapat dilakukan hanya dengan Microsoft Excel ataupun Google Spreadsheet atau program Lotus jika data yang digunakan tidak terlalu banyak.
- LQ merupakan alat analisis yang tepat untuk digunakan pada tahapan awal menganalisis suatu daerah dan dapat diikuti dengan alat analisis lain
- Tingkat spesialisasi sektor yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun dapat dibandingkan dengan LQ

Namun, dari setiap kelebihan pasti ada kekurangan, berikut adalah kekurangan dari metode analisis LQ:

- Kesederhanaan analisis LQ membuat ketergantungan akan tingkat keakuratan data yang tinggi. Data yang digunakan harus valid.
- Tingkat keakuratan data tersebut sulit untuk dipastikan dikarenakan proses pengumpulan data di lapangan yang rumit.
- Ketidakjelasan penetapan batasan wilayah pada ruang lingkup aktivitas. Hal ini

mengakibatkan perhitungan LQ dengan hasil yang aneh atau diluar dugaan.

- Nilai perhitungan yang bias, hal ini dapat disebabkan oleh tingkat disagregasi peubah spesialisasi, pemilihan peubah acuan, pemilihan entitas yang diperbandingkan, pemilihan tahun, dan kualitas data.

4.2 Cara Menghitung Daya Saing Produk dengan Daya Saing Komparatif dan Daya Saing Kompetitif

Menganalisis kondisi daya saing dari komoditi ekspor Indonesia lebih baik dengan melihat daya saing komparatif maupun daya saing kompetitif. Daya saing komparatif dapat melihat perbandingan daya saing 1 negara dengan negara lain yang menjadi mitra dagang. Daya saing kompetitif hanya melihat dari sisi 1 negara saja. Dengan menganalisis daya saing komoditi dari dua sisi (komparatif dan kompetitif), maka akan diperoleh gambaran utuh mengenai keunggulan dari komoditi tersebut. Untuk menganalisis daya saing komparatif maka akan digunakan metode *Revealed Comparative Advantage (RCA)*, sedangkan metode Porter Diamond's digunakan untuk menganalisis daya saing kompetitif.

1. Daya Saing Komparatif

Revealed Comparative Advantage (RCA) merupakan sebuah index yang digunakan untuk mengukur keuntungan maupun kerugian relatif komoditi tertentu pada suatu negara yang tercermin pada pola perdagangannya, seperti pangsa pasar ekspor. Metode yang pertama kali diperkenalkan oleh Ballasa pada tahun 1965 ini didasari oleh konsep keunggulan komparatif Ricardian. Berdasarkan metode RCA, perdagangan antar wilayah sebenarnya menunjukkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh suatu wilayah. Variabel yang diukur pada metode ini meliputi kinerja ekspor suatu produk pada wilayah terhadap total ekspor wilayah tersebut yang kemudian dibandingkan dengan pangsa nilai produk dalam perdagangan dunia. Metode RCA digunakan untuk mengukur posisi daya saing dan ekspor buah-buahan tropis Indonesia di pasar dunia. Adapun formula RCA tersebut adalah sebagai berikut:

$$RCA = \frac{\left(\frac{X_i}{X_t}\right)}{\left(\frac{W_i}{W_t}\right)} \quad (4)$$

Dimana:

X_i = Nilai ekspor komoditi i Indonesia ke negara j

X_t = Nilai total ekspor Indonesia ke negara j

W_i = Nilai ekspor komoditi i dunia

W_t = Nilai total ekspor dunia

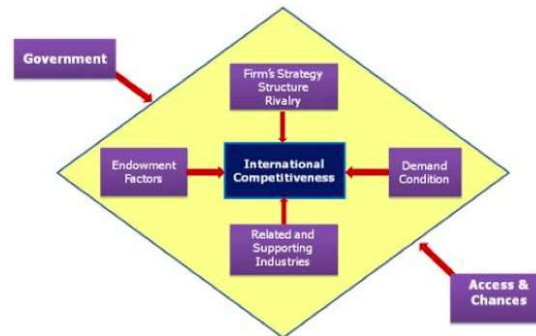
1. Nilai RCA yang diperoleh bernilai lebih dari satu ($RCA > 1$). Hal tersebut berarti negara tersebut memiliki keunggulan komparatif diatas rata-rata dunia hingga komoditi tersebut memiliki daya saing yang kuat.
2. Nilai RCA yang diperoleh kurang dari satu ($RCA < 1$), yang berarti bahwa negara tersebut memiliki keunggulan komparatif dibawah rata-rata dunia sehingga negara tersebut memiliki daya saing yang lemah pada komoditas tersebut.

Keunggulan metode RCA adalah mengurangi dampak pengaruh campur tangan pemerintah, sehingga keunggulan komparatif suatu produk dari waktu ke waktu dapat terlihat secara jelas. Adapun kekurangan dari metode RCA adalah sebagai berikut:

1. Asumsi bahwa suatu negara dianggap mengekspor semua komoditi.
2. Indeks RCA tidak dapat menjelaskan apakah pola perdagangan yang sedang berlangsung sudah optimal atau belum.
3. Tidak dapat mendeteksi dan memprediksi produk-produk yang berpotensi di masa mendatang.

2. Daya Saing Kompetitif

Untuk melakukan analisis daya saing kompetitif yang lebih cenderung pada analisis deskriptif dapat digunakan metode model daya saing internasional



Sumber: Investopedia

Gambar 4.1

Diamond Model Porter

Porter. Teori Porter tentang daya saing berangkat dari keyakinannya bahwa teori ekonomi klasik yang menjelaskan tentang keunggulan komparatif tidak mencukupi, atau bahkan tidak tepat. Menurut Porter, suatu negara memperoleh keunggulan daya saing jika perusahaan (yang ada di negara tersebut) kompetitif. Daya saing suatu negara ditentukan oleh kemampuan industri melakukan inovasi dan meningkatkan kemampuannya. Porter menawarkan Diamond Model sebagai tool of analysis sekaligus kerangka dalam membangun resep memperkuat daya saing.

Pada perkembangannya, diamond model-nya Porter menuai kritik dari berbagai kalangan. Ada beberapa aspek yang tidak termasuk dalam persamaan Porter. Pertama, model diamond dibangun dari studi kasus di sepuluh negara maju, sehingga tidak terlalu tepat jika digunakan untuk menganalisis negara-negara sedang berkembang. Kedua, meningkatnya kompleksitas akibat globalisasi, serta perubahan sistem perekonomian mengikuti perubahan rezim politik, menjadikan model diamond Porter hanya layak sebagai pioner dan acuan pertama dalam kanvas studi membangun daya saing negara.

4.3 Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan manusia yang seutuhnya, kemampuan profesional dan kematangan kepribadian saling memperkuat satu sama lain. Profesionalisme dapat turut membentuk sikap dan perilaku serta kepribadian yang tangguh, sementara kepribadian yang tangguh merupakan prasyarat dalam membentuk profesionalisme. Minimal ada empat kebijakan pokok dalam upaya peningkatan SDM yaitu: Peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusianya seperti jasmani dan rohani, serta kualitas kehidupannya seperti perumahan dan pemukiman yang sehat; Peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya; Peningkatan kualitas SDM yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK yang berwawasan lingkungan; serta Pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan dan peran hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas SDM.

Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM antara lain, *pertama*, adalah sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan IPTEK serta merata di seluruh pelosok tanah air.

Kedua adalah penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa (*character building*). *Ketiga* adalah peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai Diklat, kompetensi, pembinaan dan lain-lain. Tenaga kerja profesional dan terampil sesuai tuntutan/kebutuhan pasar merupakan faktor keunggulan suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global.

Pemerintah memegang peranan penting dalam menyiapkan program-program strategis guna menghasilkan SDM berkualitas dan siap memasuki pasar kerja. Terakhir, adalah pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda. Sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi. Karakteristik generasi muda seperti inilah yang diharapkan mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global.

Mempertimbangkan peran strategis SDM bagi akselerasi pembangunan negara, kebijakan dan langkah strategis program kerja yang komprehensif mesti terwujud agar dapat mencetak banyak SDM Indonesia yang unggul dan mampu bersaing ditingkat global. Sinergi kebijakan antar pemangku kepentingan pada sektor terkait dan lintas sektor.

Selain itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi untuk mutlak diperlukan guna menyatukan sumber daya dan potensi yang ada bagi percepatan pembangunan SDM Indonesia. Memastikan program-program yang ada berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja khususnya generasi muda. Dengan SDM yang berkualitas, target dalam pembangunan Indonesia akan lebih mudah tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- A., LIES FUAIDAH, S. ABDUSSAMAD, M. (2005). Analisis Sektor Basis Dan Non Basis Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *SOCA: Socioeconomics of Agriculture and Agribusiness*, 5(2), 1–9.
- Accurate.id. (2020). *Pengertian Faktor Produksi, Tujuan, dan Jenisnya dalam Pengembangan Bisnis*. <https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-faktor-produksi-lengkap/>
- Affandi, A., & Gunawan, E. (2018). PENGARUH EKSPOR IMPOR DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PDB INDONESIA TAHUN 1969 -2016. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2). <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/view/13021>
- Akbar, Y. R. (2017). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI INDUSTRI FURNITURE KACA DAN ALUMINIUM DI KOTA PEKANBARU. *JOM Fekon*, 4(1). <https://media.neliti.com/media/publications/122947-ID-analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi.pdf>
- Big Alpha. (2021). *Mengenal Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia*. <https://bigalpha.id/news/mengenal-komoditas-ekspor-unggulan-indonesia>
- Bisnis.com. (2021). *Permintaan dan Produksi Dalam Negeri Mulai Menggeliat*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210418/9/1382647/permintaan-dan-produksi-dalam-negeri-mulai-menggeliat>
- Case, K. E., & Fair, R. C. (2007). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Jilid 2, Terjemahan Andri dkk*. Erlangga.
- CNBC Indonesia. (2021). *PSBB Membuat Aktivitas UMKM Melambat di Kuartal IV-2020*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210218130350-17-224294/psbb-membuat-aktivitas-umkm-melambat-di-kuartal-iv-2020>
- Dalam Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri. (2019). *Pengembangan Produk Lokal, Sarana dan Iklim Usaha, Promosi dan Peningkatan Akses Pasar*. <http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2019/11/15.11.2019-Kem.Perdagangan.pdf>
- Fadhli, K., Himmah, S. R., & Taqiyuddin, A. (2021). ANALISIS PERUBAHAN POLA KONSUMSI MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Education and Development*, 9(3).
- Godam. (2006). *Organisasi Bisnis Perusahaan*.
- Investor.ID. (2019). *Global Value Chain di Indonesia*. <https://investor.id/opinion/global-value->

chain-di-indonesia

- Jhingan, M. L. (2000). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Terjemahan D. Guritno*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Katadata.co.id. (2020). *Survei KIC: 87% Konsumen Lebih Suka Belanja Merek Dalam Negeri*. <https://katadata.co.id/ekarina/brand/5f97832e74050/survei-kic-87-konsumen-lebih-suka-belanja-merek-dalam-negeri>
- Kemendag. (n.d.). *Analisis Daya Saing Indonesia dan Asean Lainnya di Pasar Produk Utama Indonesia*. <https://bppp.kemendag.go.id/pengkajian/hasilanalisis/view/ODE%3D>
- Kemenko PMK. (2020). *Membangun SDM Indonesia Membangun Sinergitas*. <https://www.kemenkopmk.go.id/membangun-sdm-indonesia-membangun-sinergitas>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2020). *Pemerintah Dorong Peningkatan Sektor Pangan dan Pertanian untuk Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/647/pemerintah-dorong-peningkatan-sektor-pangan-dan-pertanian-untuk-kesejahteraan-masyarakat-indonesia>
- Kementerian Perindustrian RI. (2020). *PSBB Jilid II Pengaruhi Kinerja Sektor Manufaktur*. <https://www.kemenperin.go.id/artikel/22037/PSBB-Jilid-II-Pengaruhi-Kinerja-Sektor-Manufaktur>
- Masterclass.com. (2021). *Economics 101: What Is the Difference Between GDP and GNP?* <https://www.masterclass.com/articles/economics-101-what-is-the-difference-between-gdp-and-gnp#what-is-gnp>
- Maulana, Y. S., Munawar, A. H., Hadiani, D., Ratningsih, & Wibisono, T. (2020). *Location Quotient Analysis (LQ) in Determining the Excellent Commodity*. 27(ICoSHEET 2019), 65–68. <https://doi.org/10.2991/ahsr.k.200723.015>
- MintoPurwo. (2000). Pelajaran Ekonomi. In *Yudistira*.
- Portal Statistik Perdagangan. (n.d.). *No Title*. Satudata Kemendag. <https://satudata.kemendag.go.id/>
- R. Jumiyaniti, K. (2018). Analisis Location Quotient dalam Penentuan Sektor Basis dan Non Basis di Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Development Review*, 1(1), 29. <https://doi.org/10.32662/golder.v1i1.112>
- Rakhmawati, N. A., Permana, A. E., & Reyhan, Arvy Muhammad Rafli, H. (2021). ANALISA TRANSAKSI BELANJA ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Teknoinfo*, 15(1).

- Raqib, M., & Rofiuddin, M. (2018). Determination of Leading Sector Sukoharjo Regency: Location Quotient and Shift Share Estaban Marquillas Approach. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 2(02).
<https://doi.org/10.29040/ijebar.v2i02.296>
- Soediyono. (1990). *Ekonomi Makro : Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*. Liberty.
- Suhardi, & Afrizal. (2021). Keunggulan Komparatif Ekspor Indonesia. *JEM: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang*, 7(1), 29–46.
- Sukirno, S. (2011). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada.
- TheBalance.com. (2020). *Gross National Product and Its Differences from Gross Domestic Product: What Does Gross National Product Say About a Country?*
<https://www.thebalance.com/what-is-the-gross-national-product-3305847>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2000). *Pembangunan Ekonomi di dunia Ketiga, Edisi Keenam Jilid 1, Terjemahan Haris Munadar*. Erlangga.
- UKM Indonesia. (n.d.). *No Title*. <https://www.ukmindonesia.id/>

